

**PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGEMBANGAN OBYEK WISATA DI
DESA BULUH CINA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2008-2011**

**RYANDO PERMANA PUTRA
DAN
Dra. WAN ASRIDA, M.Si**

ABSTRACT

Wisata's object at this Riau's Province stills really need improved again potency wisata aught nature, one of it for man the need as requirement of recreation. At alone Camphor Regency stills measly wisata's potency proprietary nature, therefore at Chinese Reed Village this there is potency wisata nature that really potential to be developed as object wisata wisata's superior and affinity. So a lot of object wisata whatever available, if developed by professional ala will be very likely if Chinese Reed Village Siak's district Camphor Regency Upstream becomes primadona good tourist visit local ala, regional, national and also international by sees on aught potency. Backed up by Silvan geographical position strategic Chinese Reed and condition of nature which is so beautiful really enable tourism for effloresce quick. But so lamentable once if wisata's potency that China Reed Is unexploited with all the best.

Key word: Wisata's object, Silvan government, Development

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang selama ini masih termarjinalkan sebagai sektor sampingan, sehingga belum mampu memberi kontribusi berarti. Sedangkan sumberdaya telah tersedia melimpah untuk mendukung pengembangannya, tinggal bagaimana strategi pengelolaannya. Pariwisata merupakan sektor yang dapat memberikan peranan besar bagi pembangunan suatu daerah sekaligus memberikan kontribusi bagi perolehan devisa maupun penciptaan kesempatan kerja. Melihat peranan dan kontribusi yang begitu besar maka kekayaan pariwisata perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Pengembangan pariwisata harus tetap mengedepankan unsur lokalitas masyarakat tempatan yang ada. Sehingga konsep pengembangan pariwisata merupakan konsep kesisteman yang utuh, terintegrasi, dan bersifat multi sektor.

Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 206, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup yaitu, urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Dengan dikembangkannya pembangunan desa wisata akan terjadi arus urbanisasi ke ruralisasi (orang-orang kota senang akan pergi ke desa untuk berekreasi). Sekarang pintu telah terbuka bagi daerah untuk berkreasi dan berinovasi membangun daerahnya sendiri. Daerah dapat membuka investasi dan melakukan promosi terhadap daerah lain, disini industrialisasi pariwisata menjadi sebuah kemestian. Industrialisasi tidaklah selamanya berarti modernisasi, karena pariwisata mempunyai kekhasan berupa penekanan penonjolan orisinalitas potensi wisata sebagai daya tarik yang tidak dapat dijumpai didaerah lain. Luasnya skala pengaruh sektor pariwisata memerlukan strategi yang mantap dalam pengelolaannya, seperti penyediaan fasilitas pelayanan dan penanganan komprehensif yang melibatkan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 15, Pemerintah Desa berkewajiban untuk mengelola potensi desa dalam rangka pencapaian tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi desa, tujuan itu antara lain: peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Masyarakat desa wisata Buluh Cina mendukung upaya pembangunan desa untuk dijadikan sebagai salah satu daerah tujuan wisata karena perekonomian masyarakat Buluh Cina masih sangat lemah sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan karena Desa Buluh Cina merupakan Desa Perikanan.

Peran Pemerintahan Desa Buluh Cina dalam pengembangan obyek wisata sebagai pelaksana meningkatkan potensi wisata tertuang pada Surat Keputusan Gubernur Riau No: KPTS,290/VII/2005 tentang penetapan kegiatan PSBC (Pacu Sampan Buluh Cina) yang menjadi *core event* usaha pariwisata dan Surat Keputusan Gubernur Riau No: KPTS,468/IX/2006 tentang Penunjukan Kelompok Hutan Buluh Cina di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Seluas 1.000 Hektare sebagai Kawasan Wisata Alam yang diserahkan kepada Pemerintahan Desa Buluh Cina

untuk dapat mengembangkan obyek wisata. Sesuai dengan Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 206, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa yaitu urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. Kebijakan dalam meningkatkan potensi wisata mengacu pada visi Desa Buluh Cina yaitu “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Mandiri, Bermartabat, Religius dan Sejahtera”. Promosi pariwisata suatu daerah terkait erat dengan perkembangan pariwisata itu sendiri bertujuan untuk menarik wisatawan domestik maupun asing untuk berkunjung ke lokasi wisata.

Ada 3 potensi obyek wisata Desa Buluh Cina yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi obyek wisata unggulan dan daya tarik wisata, yaitu ada danau, hutan dan sungai. Ada 7 danau yang baik dijadikan tempat rekreasi keluarga, namun danau tersebut sudah kurang perawatan sehingga tidak indah dipandang oleh mata. Kemudian ada potensi hutan yang mana sangat bagus sekali dijadikan tempat *hiking*, kemping dan berpetualang bahkan di dalam hutan tersebut banyak dijumpai berbagai jenis tumbuhan dan hewan, sehingga mendapat piala penghargaan dari Presiden seperti *kalpataru* yang kemudian pada 5 juni 2009 dicabut kembali. Potensi yang berikutnya ada sungai yang mana sering setiap tahunnya dijadikan tempat berlaga nya PSBC (Pacu Sampan Buluh Cina) berlangsung, namun PSBC ini sudah tidak dilaksanakan lagi semenjak tahun 2010 sampai sekarang. Gambaran mengenai jumlah pengunjung yang datang ke obyek wisata dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel I. 2
Kunjungan Wisatawan Ke Desa Wisata Dihitung Dari Karcis Masuk Dari Tahun 2008-2011

No	Tahun	Jumlah Kunjungan	Keterangan
1	2008	540 karcis	Masih dilaksanakannya Event PSBC (Pacu Sampan Buluh Cina) dan masih adanya pos penjagaan karcis masuk
2	2009	492 karcis	Masih dilaksanakannya Event PSBC (Pacu Sampan Buluh Cina) dan masih adanya pos penjagaan karcis masuk
3	2010	–	Tidak lagi dilaksanakannya Event PSBC (Pacu Sampan Buluh Cina) dan tidak adanya pos penjagaan karcis masuk
4	2011	–	Tidak lagi dilaksanakannya Event PSBC (Pacu Sampan Buluh Cina) dan tidak adanya pos penjagaan karcis masuk

Sumber: Kantor Desa Buluh Cina

Berdasarkan pada tabel di atas kunjungan wisatawan ke obyek wisata dihitung dari karcis masuk menunjukkan bahwa terjadinya penurunan minat wisatawan yang datang untuk berkunjung ke obyek wisata Buluh Cina ini. Pada tahun 2008 sampai 2009 dapat dilihat pada karcis masuk jumlah kunjungan wisatawan menurun, kemudian pada tahun 2010 sampai 2011 tidak adanya lagi karcis masuk bagi pengunjung yang ingin berwisata ke lokasi obyek wisata Buluh Cina. Kemudian ada banyaknya potensi wisata di Desa Buluh Cina yang belum dikembangkan secara maksimal sebagai daya tarik guna meningkatkan ragam motivasi wisatawan untuk berkunjung selain potensi *Core Event*. Gambaran mengenai jumlah PADes per tahun dari tahun 2008-2011 dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini :

Tabel I. 3
Jumlah PADes Buluh Cina Tahun 2008-2011

No	Tahun	Jumlah PADes	Jumlah Kontribusi Wisata Kepada PADes	Sumber
1	2008	Rp 16.953.000	Rp 8.889.000	Karcis Masuk
2	2009	Rp 11.675.000	Rp 8.570.000	Karcis Masuk
3	2010	Rp 5.370.000	Rp 2.200.000	Karcis Masuk
4	2011	Rp 3.610.000	Rp 1.580.000	Karcis Masuk

Sumber: Kantor Desa Buluh Cina

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah Pendapatan Asli Desa (PADes) dimulai pada tahun 2008 berjumlah Rp 16.953.000, pada tahun 2009 berjumlah Rp 11.675.000, pada tahun 2010 berjumlah Rp 5.370.000, dan pada tahun 2011 berjumlah Rp 3.610.000. Jumlah ini menunjukkan terjadinya penurunan pendapatan, hal ini disebabkan karena tidak berjalannya lagi PSBC (Pacu Sampan Buluh Cina) sehingga minat wisatawan menurun dan pendapatan juga ikut menurun. Potensi *Core Event* PSBC (Pacu Sampan Buluh Cina) ini banyak mendatangkan pengunjung masyarakat ataupun wisatawan dibandingkan dengan potensi yang lainnya yang ada.

Untuk mengatasi persoalan itu, sangat diharapkan peran yang lebih maksimal dari Pemerintahan Desa Buluh Cina yang dalam hal ini telah berdasarkan keputusan Gubernur Riau yaitu meningkatkan potensi wisata dan kunjungan wisatawan. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, dimana terdapatnya fenomena-fenomena yang terjadi dan pentingnya peran pemerintahan desa sebagai tuan rumah di Desa wisata Buluh Cina, yang merupakan salah satu DTW (Daerah Tujuan Wisata) di Kabupaten Kampar, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian ini yaitu :***“Peran Pemerintahan Desa Dalam Pengembangan Obyek Wisata Di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2008-2011”***.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data

tersebut, menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki (Lexi J. Meleong, 1991:30). Metode penelitian ini tentunya bisa menggambarkan perjalanan suatu gagasan atau pemikiran yang terkait dalam masalah-masalah yang dibatasi dalam penelitian ini.

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah tempat-tempat yang terkait dengan pengembangan obyek wisata. Alasan pemelilihan lokasi ini adalah, karena Desa Buluh Cina mempunyai potensi obyek wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengembangan obyek wisata pedesaan.

2. Informan Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi dilakukan dengan wawancara mendalam kepada aktor-aktor yang terlibat di dalam pemerintahan desa. Informan dipilih berdasarkan penarikan sampel nonprobability yaitu dengan cara *purposive sampling* hanya orang-orang yang ahli dan mengerti tentang fenomena yang terjadi.

Dalam *purposive sampling*, pertimbangan peneliti memegang peranan, bahkan menentukan dalam pengambilan sekumpulan obyek untuk diteliti. Jelas bahwa nilai penelitian yang diperoleh berdasarkan sampel ini tergantung pada peneliti yang memberi pertimbangan (Syarifudin Hidayat, 2002:131-132). Untuk jelas nya mengenai informan yang diambil dalam penelitian ini, maka dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel I. 5

Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1.	M Ralis T	Kepala Desa Buluh Cina
2.	M Rais	Sekretaris Desa Buluh Cina
2.	Ali Amran	Wakil Ketua BPD Desa Buluh Cina
3.	Hendri K H	Kaur Kesejahteraan Desa Buluh Cina
4.	H Yanuar SH	Anggota DPRD Komisi IV Kabupaten Kampar
5.	Agusnar dan Makmur Hendrik	Tokoh Masyarakat
6.	Ahmad Nawawi	Akademisi Pariwisata

Sumber : Olahan Penulis

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini ada 2 jenis data:

a. Data Primer

Data ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau informan yang dilakukan dengan interview (wawancara). Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan untuk membantu agar wawancara tidak lari dari topik dan tujuan yang ingin diperoleh, sehingga informasi yang didapat sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan meliputi peran pemerintahan desa dan faktor yang menghambat upaya pengembangan obyek wisata Buluh Cina.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang tidak di peroleh secara langsung dari responden melainkan di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip, buku-buku dan hasil-hasil penelitian lainnya yang berkenaan dalam penelitian ini. Data yang dicari yaitu sejarah Desa Buluh Cina, keadaan geografis Desa Buluh Cina, keadaan demografis Desa Buluh Cina, sarana sosial dan ekonomi, keistimewaan Desa Buluh Cina, visi dan misi Desa Buluh Cina dan struktur organisasi pemerintahan Desa Buluh Cina.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu :

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi kepada informan pada obyek penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi dari informan atau orang yang dianggap mengetahui tentang permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang sudah ada sebelumnya. Teknik pengambilan data secara tertulis bersumber pada catatan-catatan, arsip-arsip, gambar atau foto pada acara-acara tertentu yang ada di lokasi penelitian yang berkaitan dengan penelitian dan bertujuan untuk memperjelas dan mendukung proses penelitian.

3. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung ke lapangan. Teknik ini dilakukan untuk mendukung data-data yang penulis dapatkan dari data-data yang sebelumnya telah penulis dapatkan.

5. Analisis data

Untuk penelitian ini digunakan metode kualitatif, dimana metode ini menunjukkan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu (P. Joko Subagyo, 2004:94). Dalam menganalisa data kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*versetehen*), yaitu

berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi–situasi tertentu. (Lexi J. Meleong, 2000: 9)

PEMBAHASAN

Penyelenggaraan kepariwisataan pada prinsipnya diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui peningkatan pendapatan nasional, perluasan dan pemerataan kesempatan usaha dan lapangan kerja. Untuk mewujudkan maksud penyelenggaraan kepariwisataan itu, diperlukan keterpaduan peranan pemerintah desa dan pemerintah daerah, badan usaha dan masyarakat secara serasi sehingga dapat mewujudkan potensi pariwisata nasional yang memiliki kemampuan daya saing baik ditingkat regional maupun global.

Pengembangan potensi pariwisata dilakukan sebagai upaya penyusunan program pengembangan masyarakat di Desa Buluh Cina. Pada dasarnya bagian-bagian dari gejala pariwisata terdiri dari 3 unsur yakni: Manusia (unsur insani sebagai pelaku kegiatan pariwisata), Tempat (unsur fisik sebenarnya tercakup oleh kegiatan itu sendiri), dan Waktu (unsur tempo yang dihabiskan dalam perjalanan itu sendiri dan selama berdiam di tempat tujuan). Inilah unsur-unsur yang menjadi persyaratan terjadinya gejala pariwisata tersebut.

Di dalam Surat Keputusan Gubernur Riau No: KPTS 290/VII/2002 tentang penetapan kegiatan PSBC (Pacu Sampan Buluh Cina) yang menjadi *core event* usaha promosi pariwisata yang diserahkan kepada Pemerintah Desa Buluh Cina untuk dapat mengembangkan obyek wisata yang ada dan dalam tujuan meningkatkan potensi wisata mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 tahun 2005 tentang Desa paragraf 2 pasal 15, Pemerintah Desa berkewajiban untuk mengelola potensi desa dalam rangka pencapaian tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi desa, tujuan itu antara lain: peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

A. Peran Pemerintahan Desa Dalam Pengembangan Obyek Wisata

Peran pemerintahan desa dalam mengembangkan obyek wisata merupakan syarat mutlak dalam memajukan potensi wisata yang dimiliki desa tersebut, hal ini dikarenakan dalam dasawarsa terakhir ini banyak negara berkembang menaruh perhatian yang khusus terhadap industri pariwisata. Hal ini jelas kelihatan dengan banyaknya program pengembangan kepariwisataan di negara tersebut.

Penggalian potensi wisata di desa bulu cina saat ini telah dilaksanakan secara bertahap oleh pemerintah desa bulu cina, banyaknya potensi yang dimiliki menjadi modal awal dalam menambah PADes dari sektor pariwisata. Dengan demikian potensi yang dimiliki dapat dikembangkan sebagai aktivitas perekonomian dalam membangun obyek wisata Desa Buluh Cina menjadi sesuatu yang mudah untuk dapat menghasilkan PADes. Berbagai upaya dilakukan oleh Ninik Mamak, Kepala Desa dan masyarakat Buluh Cina Kabupaten Kampar untuk menjaga dan melestarikan hutan tanah dan air sebagai sumber kehidupan mereka di desa dan sudah mulai dirintis sejak tahun 1997 secara aktif dan berkesinambungan. Hasilnya kondisi hutan ulayat sangat baik dengan kondisi hutan lebat. Dengan berbagai aktifitas perlindungan lingkungan yang dikembangkan masyarakat Desa Buluh Cina upaya pencegahan penebangan liar dan pencemaran

7 danau didalam hutan ulayat tersebut juga dilakukan secara lebih intensif dengan berbagai larangan serta pembinaan masyarakat berupa penyuluhan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar provinsi Riau.

Berdasarkan teori kebijakan menurut Gamal Suwanto (1997: 57) menulis mengenai pola kebijakan pengembangan obyek wisata, yaitu prioritas pengembangan wisata yang terdiri dari:

1. Rencana Pengembangan

Mengacu pada konsep perencanaan pengembangan desa wisata dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (2001), maka pola pengembangan desa wisata diharapkan memuat prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan adat istiadat atau budaya masyarakat.
Suatu desa yang tata cara dan ada istiadatnya masih mendominasi pola kehidupan masyarakatnya, dalam pengembangannya sebagai atraksi wisata harus disesuaikan dengan tata cara yang berlaku di desanya.
- b. Pembangunan fisik untuk meningkatkan kualitas lingkungan desa.
Pengembangan pariwisata di suatu desa pada hakekatnya tidak merubah apa yang sudah ada di desa tersebut, tetapi lebih kepada upaya merubah apa yang ada di desa dan kemudian mengemasnya sedemikian rupa sehingga menarik untuk dijadikan atraksi wisata. Pembangunan fisik yang dilakukan dalam rangka pengembangan desa seperti penambahan sarana jalan setapak, penyediaan MCK, penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lebih ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang ada sehingga desa tersebut dapat dikunjungi dan dinikmati wisatawan.
- c. Memperhatikan unsur kelokalan dan keaslian
Arsitektur bangunan, pola lanskap serta material yang digunakan dalam pembangunan haruslah menonjolkan ciri khas desa, mencerminkan kelokalan dan keaslian wilayah setempat.
- d. Memberdayakan masyarakat desa wisata
Unsur penting dalam pengembangan desa wisata adalah keterlibatan masyarakat desa dalam setiap aspek wisata yang ada di desa tersebut. Pengembangan desa wisata sebagai pengejawantahan dari konsep *Pariwisata Inti Rakyat* mengandung arti bahwa masyarakat desa memperoleh manfaat sebesar-besarnya dalam pengembangan pariwisata. Masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata dalam bentuk pemberian jasa dan pelayanan yang hasilnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat diluar aktifitas mereka sehari-hari.
- e. Memperhatikan daya dukung dan berwawasan lingkungan
Prinsip-prinsip pariwisata yang berkelanjutan harus mendasari pengembangan desa wisata. Pengembangan yang melampaui daya dukung akan menimbulkan dampak yang besar tidak hanya pada lingkungan alam tetapi juga pada kehidupan sosial budaya masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi daya tarik desa tersebut. Beberapa bentuk keterlibatan masyarakat tersebut adalah penyediaan fasilitas akomodasi berupa rumah-rumah penduduk (*home stay*), penyediaan kebutuhan konsumsi wisatawan, pemandu wisata, penyediaan transportasi lokal, pertunjukan kesenian, dan lain-lain.

Rencana Pengembangan pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat lokal, merekalah yang akan membangun, memiliki dan mengelola langsung fasilitas wisata serta pelayanannya, sehingga dengan demikian masyarakat diharapkan dapat menerima secara langsung keuntungan

ekonomi. Dalam perencanaan tidak terlepas sebuah proses partisipasi yang merupakan sebuah proses dimana masyarakat sebagai *stakeholders*, terlibat mempengaruhi dan mengendalikan pembangunan di tempat mereka masing-masing. Masyarakat turut serta secara aktif dalam memprakarsai kehidupan mereka, melalui proses pembuatan keputusan dan perolehan sumberdaya dan penggunaannya. Masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan pariwisata desa. Pengembangan Pariwisata selain dapat mengurangi tingkat kemiskinan, hal ini juga akan memberikan berbagai pemahaman yang baik bagi masyarakat untuk lebih mengerti bahwa banyak sekali manfaat dari penyelenggaraan pariwisata tersebut. Selain dapat mempertahankan kelestarian alam dan adat-istiadat secara turun-temurun hal ini juga sangat efektif bagi penilaian para wisatawan tentang kapabilitas pemerintahan desa dalam mengelola wisata Desa Buluh Cina.

Di samping itu, rencana pengembangan tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijakan pemerintahan desa, untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan wisata Desa Buluh Cina. Peranan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparat pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum dalam negeri maupun ke luar negeri. Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir diseluruh daerah Indonesia terdapat potensi pariwisata, maka yang perlu diperhatikan adalah sarana transportasi, keadaan infrastruktur dan sarana-sarana pariwisata.

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana

Rencana pengembangan tidak terlepas dari pentingnya kedudukan sarana dan prasarana, karena dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap akan lebih mempercepat kemajuan sebuah objek wisata. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana tentunya memerlukan cara-cara untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pengunjung, sarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan di Obyek Wisata Desa Buluh Cina adalah dengan membangun tempat taman rekreasi, outbond, membangun gazebo, Rumah Makan Tradisional, membangun penginapan dan gapura yang lebih menarik

Penyediaan sarana dan prasarana adalah satu hal yang sangat penting bagi suatu obyek wisata, karena dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap akan lebih mempercepat kemajuan suatu obyek wisata. Di Obyek Wisata Desa Buluh Cina memiliki sarana dan prasarana masih kurang lengkap dan masih ada banyak sarana dan prasarana yang harus ditambah agar para pengunjung Obyek Wisata Desa Buluh Cina merasa nyaman dan bisa tinggal lama di Desa tersebut.

3. Sistem Promosi

a. Pemasangan Iklan melalui Media Cetak

Pemasangan iklan pada media cetak dimaksudkan agar khalayak ramai dapat melihat dan membaca pada surat kabar dan majalah yang menerbitkan profil dari pariwisata Buluh Cina. Surat kabar dan majalah adalah media yang mudah diperoleh oleh masyarakat karena penyebarannya tidak hanya diperuntungkan untuk masyarakat Buluh Cina saja, masyarakat luar daerah juga membelinya sebagai bahan bacaan dalam perjalanan baik perjalanan wisata maupun perjalanan dalam rangka pekerjaan. Mempromosikan Desa Buluh Cina sebagai obyek wisata melalui media cetak dianggap cara yang cukup efektif. Karena selain akan menarik minat tidak

hanya wisatawan lokal, hal ini juga akan menarik minat wisatawan nasional maupun internasional untuk dapat berkunjung Desa Buluh Cina di Kabupaten Kampar. Selain surat kabar dan majalah, peluncuran buku-buku oleh penerbit juga dapat dilakukan sebagai sarana promosi pariwisata Desa Buluh Cina, karena buku-buku ini dapat tersebar luas di seluruh Indonesia.

b. Pemasangan Iklan melalui Media Elektronik

Dalam mempromosikan pariwisata, selain pemasangan iklan pada media cetak, pemasangan iklan pada media elektronik juga salah satu cara yang tepat dalam mempromosikan pariwisata. Karena cara ini lebih cepat dari pada pemasangan iklan pada media cetak. Dari media elektronik semua golongan dapat melihat tayangan profil pariwisata Desa Buluh Cina, sebab media elektronik bukan lagi sarana bagi masyarakat menengah keatas saja. Maka dari itu pemasangan iklan pada media elektronik harus dilakukan agar memaksimalkan promosi pariwisata. Modal merupakan faktor penting yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana, biaya operasional dan lainnya. Dari hasil wawancara dengan pengelola Obyek Wisata Desa Buluh Cina menyatakan bahwa mengalami kekurangan modal, pengelola mengharapkan adanya investor yang mau menanamkan modal untuk Obyek Wisata Desa Buluh Cina.

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa tidak hanya peran Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa ataupun Pemerintah Provinsi saja yang dibutuhkan melainkan juga peran swasta sebagai investor yang pada dasarnya memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pengembangan obyek wisata Desa Buluh Cina, maka dari itu pemerintah desa tidak hanya melakukan kegiatan promosi untuk menarik minat wisatawan tetapi juga menarik investor untuk menanamkan modalnya ke Desa Buluh Cina yang memiliki kekayaan wisata yang tak terbatas

Pasal 6 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 menjelaskan, pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Rumusan arah kepariwisataan yang lebih operasional tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan menerangkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. Kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya.
- b. Nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- c. Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup, dan
- d. Kelangsungan usaha wisata.

B. Faktor Penghambat Upaya dalam Pengembangan Obyek Wisata Desa Buluh Cina

Pengelolaan pariwisata pada dasarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Pemerintahan Desa melainkan merupakan tanggungjawab dari instansi terkait termasuk Pemerintah Daerah dan Pusat, karena selain dapat berdampak positif bagi pengentasan suatu kemiskinan juga dapat menambah devisa Negara itu sendiri. Dengan demikian, penyelenggaraan dan pengelolaan usaha pariwisata mau tidak mau harus diurus dan dikelola secara profesional. Hal ini tentu saja, peraturan-peraturan daerah yang memuat dan mengatur pengurusan dan pengelolaan kepariwisataan mengarah atau memuat usaha kepariwisataan bermutu dan sesuai dengan stándar yang sudah ditetapkan disamping sertifikasi. Artinya, peraturan-peraturan daerah

mengenai kepariwisataan tidak dapat lagi sekedar mengejar redistribusi atau pengendalian, melainkan berupa peraturan daerah yang memberikan perspektif bagi pengembangan dunia usaha pariwisata yang diposisikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau menghapus kemiskinan.

Adapun faktor penghambat dalam upaya pengembangan obyek wisata Desa Buluh Cina adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Anggaran yang diperuntukkan bagi Pengembangan Obyek Wisata Desa Buluh Cina dari Pemerintah Kabupaten Kampar

Anggaran yang diperuntukkan bagi pengembangan pariwisata Desa Buluh Cina masih sangat minim, pembangunan tersebut lebih besar diperuntukkan bagi pegawai negeri, sehingga pengembangan tersebut tidak maksimal. Hilangnya event-event tahunan yang bersifat internasional seperti Pacu Sampan Buluh Cina disebabkan karena Pemerintahan Desa hanya menunggu kebijakan itu keluar dari pemerintah kabupaten untuk memberikan anggaran bagi pengembangan wisata desa Buluh Cina. Maka dari itu masalah tanggung jawab anggaran itu tidak seharusnya dibebankan oleh pemerintahan desa saja, melainkan juga pemerintah Provinsi Riau.

Pemerintah Provinsi Riau seharusnya juga mampu melaksanakan amanat dari keputusan gubernur Riau demi membangun perekonomian masyarakat Desa Buluh Cina yang saat ini dapat dikatakan masih termarginalkan akibat tidak terlaksananya pembangunan dibidang perkebunan rakyat sebanyak 1.500 hektar. Anggaran merupakan faktor yang sangat penting bagi pengembangan pariwisata.

2. Kurangnya Perhatian Pemerintah Kabupaten Kampar dalam Pengembangan Wisata Desa Buluh Cina dibidang Infrastruktur

Desa Buluh Cina dikelola oleh Pemerintah Desa sejak otonomi daerah dan dana yang digunakan lebih bersifat swadaya desa itu sendiri, hal ini tampak dari berbagai fasilitas pendukung yang tidak cukup memadai dalam menarik wisatawan lokal. Banyaknya jalan yang dihiasi lubang menjadi faktor penghambat yang cukup serius. Disamping dapat mengganggu kenyamanan pengunjung hal ini juga berdampak negatif dalam menarik minat pengunjung wisata Desa Buluh Cina.

Perbaikan jalan-jalan yang berlubang, penginapan, adalah upaya yang harus dilakukan pemerintahan Desa Buluh Cina. Hal ini dikarenakan apabila hal itu terlaksana dengan baik maka kemajuan Desa Buluh Cina akan terwujud.

3. Tidak Adanya Petugas Kebersihan Wisata Desa Buluh Cina

Banyaknya sampah yang bertebaran di Desa Buluh Cina dan danau yang sangat kotor merupakan bukti bahwa tidak adanya petugas kebersihan yang benar-benar merawat wisata Desa tersebut, dan pembersihan itu hanya dilakukan pada saat menteri datang, dan semua jajaran ikut membersihkan baik Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, maupun Pemerintah Provinsi Riau. Seharusnya dengan adanya kebersihan yang baik maka kenyamanan bagi para pengunjung akan dapat dirasakan, kebersihan adalah faktor yang sangat penting yang harus dilakukan oleh Pemerintahan Desa Buluh Cina untuk memajukan sektor pariwisata yang ada.

Kontribusi Pemerintah Kabupaten sangat dibutuhkan oleh Pemerintahan Desa selain dalam bidang pendanaan juga dalam bidang pembelajaran. Melalui bimbingan terhadap aparatur desa seharusnya menjadi upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar. Dengan menunjuk petugas kebersihan untuk merawat wisata Buluh Cina hal itu akan mampu

memberikan inovasi baru dalam memulai perubahan kearah yang lebih baik. Pada dasarnya kebersihan adalah faktor yang paling penting dalam menciptakan kenyamanan bagi pengunjung wisata Desa Buluh Cina. Akan tetapi tidak itu saja yang menjadi faktor pengambat dalam pengembangannya, hal ini juga terletak pada kurang perhatiannya Pemerintah Kabupaten Kampar dalam merespon berbagai problem yang terjadi.

4. Promosi Kawasan yang Masih Kurang Optimal

Dalam pemasaran, promosi merupakan salah satu bagian dari bauran pemasaran sehingga dalam kegiatan promosi tidak bisa berjalan sendiri dan terpisah dari indikator-indikator bauran pemasaran yang lainnya. Kegiatan promosi ini harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan (tidak putus) dengan harapan memperbesar peluang meningkatnya pengunjung ke obyek wisata tersebut.

Sektor pariwisata termasuk salah satu sektor unggulan di Indonesia, dan karena pengembangan industri pariwisata saat ini lebih diarahkan pada pariwisata domestik, otomatis kontribusi yang diberikan pariwisata domestik mengalami peningkatan. Bagi suatu daerah wisata, kontribusi yang diterima dari pengembangan industri kepariwisataan antara lain adalah semakin terbukanya peluang peningkatan PAD yang berasal dari pengeluaran wisatawan nusantara selama berada di destinasi, peningkatan investasi dan pembangunan melalui pembangunan-pembangunan fisik, terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat lokal, dan semakin banyaknya informasi dan penerapan teknologi yang masuk ke daerah tersebut.

Pengembangan wisata Buluh Cina belum dilakukan secara optimal. Pemerintah Desa Buluh Cina dinilai perlu lebih optimal mengembangkan potensi pariwisata. Karena tanpa upaya promosi yang optimal niscaya akan cukup sulit bagi pelaku wisata mendatangkan wisatawan ke daerah. Upaya mengembangkan obyek dan daya tarik wisata serta kegiatan promosi dan pemasarannya, baik di dalam maupun di luar negeri terus ditingkatkan secara terencana, terarah, terpadu, dan efektif antara lain dengan memanfaatkan secara optimal kerja sama kepariwisataan regional dan global guna meningkatkan hubungan antarbangsa.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa peran pemerintahan desa mencakup tiga hal penting diantaranya yaitu, rencana pengembangan, pembangunan sarana dan prasarana dan Sistem Promosi.

Rencana Pengembangan pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat Desa Buluh Cina itu sendiri, artinya merekalah yang akan membangun, memiliki dan mengelola langsung fasilitas wisata serta pelayanannya, sehingga dengan demikian masyarakat diharapkan dapat menerima secara langsung keuntungan ekonomi.

Di Obyek Wisata Desa Buluh Cina memiliki sarana dan prasarana masih kurang lengkap dan masih ada banyak sarana dan prasarana yang harus ditambah agar para pengunjung Obyek Wisata Desa Buluh Cina merasa nyaman dan bisa tinggal lama di Desa Buluh Cina dan Apabila sarana dan prasarana telah terealisasikan dengan baik maka obyek wisata tersebut akan semakin berkembang.

Sistem Promosi Pengembangan di Desa Buluh Cina, sangat memegang peranan penting dalam proses perencanaan pembangunan dibidang pariwisata, karena dengan bantuan promosi yang dilengkapi dengan data, fakta dan informasi, pemerintah desa dapat melakukan analisis dan prediksi terhadap kecenderungan-kecenderungan yang akan terjadi di masa depan. Promosi pariwisata di Desa Buluh Cina dibagi menjadi dua bagian diantaranya, yaitu Pemasangan Iklan melalui Media Cetak dan Pemasangan Iklan melalui Media Elektronik.

Faktor Penghambat Upaya dalam Pengembangan Obyek Wisata Desa Buluh Cina

1. Kurangnya Anggaran Yang Diperuntukkan Bagi Pengembangan Obyek Wisata Desa Buluh Cina Dari Pemerintah Kabupaten Kampar
2. Kurangnya Perhatian Pemerintah Kabupaten Kampar Dalam Pengembangan Wisata Desa Buluh Cina Dibidang Infrastruktur
3. Tidak Adanya Petugas Kebersihan Wisata Desa Buluh Cina
4. Promosi Kawasan Yang Masih Kurang Optimal

b. Saran

Agar lokasi kunjungan wisatawan yang lebih ramai lagi, selain pemerintah mensosialisasikan keberadaan hutan dan Pacu Sampan Buluh Cina ini dengan baik, Pemerintah harus melakukan pengembangan lagi sarana dan prasarana penunjang lainnya. Karena Potensi wisata yang dimiliki Desa Buluh Cina tidak akan pernah habis, oleh sebab itu maka perlu upaya baik dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten ataupun pemerintah desa itu sendiri. Pembangunan perekonomian di Desa Buluh Cina diharapkan dapat memegang peranan yang menentukan dan dapat dijadikan sebagai katalisator untuk mengembangkan pembangunan sektor-sektor wisata lain secara bertahap. Berbagai acara seperti event-event tahunan juga harus dilaksanakan lagi seperti Pacu Sampan Buluh Cina yang saat ini tidak tampak lagi yang dilaksanakan di Desa Buluh Cina.

DAFTAR PUSTAKA

a. Sumber Buku

Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Anderson, James. (1960). *Public Policy Making, dikutip oleh Budi Winarno. (2007).Kebijakan Publik Teori dan Proses*.Yogyakarta:Media Pressindo.

Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri.2005. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik..* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ghafar, Affan. (2002). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Hidayat, Syarifudin. (2002). *Metodelogi Penelitian*.Bandung: Mandar Maju.

- J. Meleong, Lexi. (1991 dan 2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Joyosuharto, Sunardi. (2001). *Dasar-dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta: Liberty.
- Latham, Earl. (1965). *The Group Basis of Politics*. New York: Octagon Books.
- Ndraha, Taliziduhu. (1991). *Dimensi-Dimensi Pemerintahan desa*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Santosa, Pandji. (2008). *Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Salam, Dharma S. (2004). *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siagian, Sondang P, (2002). *Pengawasan Melekat di Lingkungan Pemerintahan*. Jakarta : Erlangga.
- Subagyo, P. Joko. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suwantoro, Gamal, 1997. *Dasar-dasar Pariwisata*. ANDY. Yogyakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. (2007). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Perca.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. (2003). *Kebijakan Publik Untuk Pemimpin Berwawasan Internasional*. Yogyakarta: Balairung dan Co.
- Widiyanti, Ninik dan Y.W. Sunindhia. (1987). *Kepala Daerah dan Pengawasan dari Pusat*. Jakarta: Bina Aksara.
- Widjaja, H.A.W. (2003). *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

b. Peraturan Perundangan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

Surat Keputusan Gubernur Riau No: KPTS,290/VII/2005 tentang penetapan kegiatan PSBC yang menjadi *core event* usaha promosi pariwisata.

Surat Keputusan Gubernur Riau No: KPTS,468/IX/2006 tentang Penunjukan Kelompok Hutan Buluh Cina di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Seluas 1.000 Hektare sebagai Kawasan Wisata Alam.

c. Internet

www.bappenas.go.id/get-file-server/node/5991